

Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi  
Vol. 20 No. 1 April 2020 : 43-60  
Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>

ISSN : 2442 - 9708 (Online)  
ISSN : 1411 - 8831 (Print)

## TRANSPARANSI INFORMASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI WEBSITE: FAKTOR POLITIK ATAU KEUANGAN?

Sutaryo<sup>1\*</sup>

Kurniasari Tri Amanu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret & BPKP, Indonesia

\*[sutaryo@staff.uns.ac.id](mailto:sutaryo@staff.uns.ac.id)

### Abstract

*This research aims to examine the effect of political factors covering regent/mayor profile, political ideology and political competition level, and financial factors covering liquidity and regional independence on information transparency of local government in Indonesia. This study analyzes 309 Indonesian local government websites using multiple linear regression. The result shows that regent/mayor profile, political competition level and regional independence affect information transparency of local government. Meanwhile, political ideology and financial liquidity do not have significant effect. This result implies to local governments to improve their financial independence in order to encourage more complete information delivery. In addition, people should be more precise and careful on local government information, especially in a local government led by incumbent head and in low local political competition. Incumbent regional heads tend to deliver more information to defend their power while low local political competition leads to a tendency of lower information delivery.*

**Keywords:** *Liquidity; Political Factors; Regional Independence; Regent/Mayor Profile; Transparency*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor politik yang meliputi profil kepala daerah, ideologi politik dan tingkat persaingan politik, serta faktor keuangan yang meliputi likuiditas dan kemandirian daerah terhadap transparansi informasi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menganalisis 309 website pemerintah daerah di Indonesia menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil kepala daerah, tingkat persaingan politik dan kemandirian daerah mempengaruhi transparansi informasi pemerintah daerah. Sementara itu, ideologi politik dan likuiditas keuangan tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menyiratkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan mereka untuk mendorong penyampaian informasi yang lebih lengkap. Selain itu, masyarakat harus lebih presisi dan berhati-hati pada informasi yang diterbitkan pemerintah daerah, terutama di pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala petahana dan dalam kompetisi politik lokal yang rendah. Pimpinan daerah yang berkuasa cenderung memberikan lebih banyak informasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka sementara kompetisi politik lokal yang rendah mengarah pada kecenderungan penyampaian informasi yang lebih rendah.*

**Kata kunci:** Likuiditas; Independensi Daerah; Kepala Daerah; Politik; Transparansi

**JEL Classification:** H70, M48

*Submission date:* June 2019

*Accepted date:* April 2020

---

*\*Corresponding Author*

## PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, peranan keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk masyarakat, baik informasi keuangan maupun informasi lainnya. Terlebih lagi, dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut di Indonesia, transparansi informasi menjadi sebuah keharusan (Adiputra, Utama, & Rossietta, 2018). Schillemans, Van Twist, & Vanhommerig (2013) menyatakan bahwa seiring perkembangan zaman dan teknologi, publik memiliki tuntutan akuntabilitas yang meningkat dalam bentuk transparansi informasi dengan mekanisme yang mudah diakses. Masyarakat memerlukan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait keuangan, kinerja, dan kegiatan pemerintah untuk membantu memonitor pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Transparansi merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola pada pelayanan publik (Araujo & Tejedo-Romero, 2016a). Dengan adanya transparansi, masyarakat akan mampu menilai kinerja pemerintah daerah (da Cruz, Tavares, Marques, Jorge, & de Sousa, 2016), baik dari segi proses pelayanan masyarakat, serta proses dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan UU/14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik dengan memanfaatkan media cetak maupun elektronik. Ketentuan dan rincian lebih lanjut mengenai informasi publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan informasi mengenai laporan keuangan yang wajib disediakan yang lebih lanjut diatur dalam Instruksi Mendagri/188.52/1797/SJ/2012.

Pemerintah daerah (Pemda) diinstruksikan untuk membuat konten atau portal Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) pada *website* Pemerintah Daerah yang berisi berbagai dokumen terkait anggaran dan laporan keuangan Pemda. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan proses pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Adiputra *et al.*, 2018; Styles & Tennyson, 2007). Walaupun telah terdapat peraturan yang mendasari kewajiban badan publik untuk keterbukaan informasi publik dan terdapat *website* Pemda sebagai media untuk mempermudah penyampaian informasi publik, nilai indeks rata-rata publikasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah melalui *website* dalam sepuluh tahun implementasi *e-government* masih rendah (Martani, Nastiti, & Wicaksono, 2014). Tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pada pemerintah daerah hanya sebesar 15% dan 49% pemerintah daerah tidak menyediakan informasi apapun terkait keuangan dan kinerja (Martani, *et al.*, 2014). Utomo (2015) juga menunjukkan bahwa level pengungkapan informasi keuangan pemda melalui *website* masih rendah dengan persentase sebesar 42,07%. Relatif rendahnya transparansi publik oleh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi isu yang cukup *urgent* untuk diperbaiki, mengingat adanya media *website* yang

memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya secara transparan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi informasi pemerintah daerah melalui *website* pemda, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang lebih baik.

Beberapa literatur menguji faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan pemerintah, salah satunya adalah faktor politik seperti profil kepala daerah (Gherghina, 2011), ideologi politik (Araujo & Tejedro-Romero, 2016a; Piotrowski & Van Ryzin, 2007), dan kompetisi politik (Araujo & Tejedro-Romero, 2016a). Gherghina (2011) menunjukkan bahwa terdapat evaluasi positif terhadap kinerja dari petahana sehingga masyarakat akan cenderung memilih ulang petahana pada pemilu. Kepala daerah yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau sekretaris daerah mempunyai insentif lebih dalam pengalaman menjalankan pemerintahan, termasuk di dalamnya yakni pemahaman atas pentingnya transparansi informasi. Sementara itu, Piotrowski & Van Ryzin (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ideologi politik terhadap transparansi, walaupun dianggap masih ambigu. Faktor berikutnya tingkat kompetisi politik. Araujo & Tejedro-Romero (2016a) menyatakan bahwa semakin ketat atau tinggi suatu tingkat kompetisi politik, maka pihak politik yang berkuasa akan berusaha meningkatkan transparansi informasi untuk memperkuat posisinya. Selain faktor politik, faktor keuangan juga diduga mempengaruhi tingkat transparansi Pemda dalam *website*. Faktor keuangan yang dimaksud adalah profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* (Aly, Simon, & Hussainey, 2010; Oyelere, Laswad, & Fisher, 2003). Sementara Cohen (2008) menggunakan *size*, *leverage*, dan *liquidity*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu dalam literatur transparansi informasi sebagaimana di atas masih memiliki keterbatasan dimana faktor yang diteliti berfokus hanya pada satu faktor saja, baik politik (Araujo & Tejedro-Romero, 2016a; Gherghina, 2011; Piotrowski & Van Ryzin, 2007) ataupun keuangan (Aly *et al.*, 2010; Cohen, 2008). Oleh karena itu, diperlukan kajian secara komprehensif mencakup kedua faktor tersebut untuk pengembangan literatur dimana penelitian ini menggunakan kedua faktor tersebut dalam analisis penelitian. Adapun faktor politik dalam penelitian ini terdiri dari profil kepala daerah, ideologi, dan kompetisi politik, sedangkan faktor keuangan direpresentasikan oleh likuiditas dan kemandirian daerah.

Lingkungan politik berperan dalam mewujudkan transparansi pada tingkat pemerintah daerah (Adiputra *et al.*, 2018). Kepala daerah dengan status petahana mempunyai insentif dalam pemahaman atas transparansi informasi publik sehingga akan cenderung lebih transparan. Gherghina (2011) menunjukkan bahwa kepala daerah petahana dengan kinerja yang lebih baik cenderung memberikan informasi lebih banyak sehingga masyarakat akan memilih ulang pada pemilu berikutnya. Selanjutnya, ideologi politik mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dan transparansi. Araujo & Tejedro-Romero (2016a), del Sol (2013), dan Piotrowski & Van Ryzin (2007) meyakini terdapat hubungan antara ideologi politik dan transparansi. Garcia-Sanchez *et al.* (2013) menunjukkan bahwa partai sayap kiri cenderung lebih transparan dibandingkan partai sayap kanan di pemerintahan Spanyol. Namun demikian, Piotrowski & Van Ryzin (2007) dan Grimmelikhuisen & Welch (2012) menyatakan bahwa kedua belah partai mempunyai ketertarikan terhadap transparansi serta memiliki hubungan yang ambigu terhadap transparansi karena adanya konflik kepentingan dalam pengungkapan informasi.

Persaingan politik terkait dengan pengawasan kegiatan antar partai akan memunculkan tekanan bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan (Araujo & Tejedro-Romero, 2016a). Berliner & Erlich (2015) menyatakan faktor politik lain yakni kompetisi politik yang dianggap berperan penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi. Ketika kompetisi politik rendah atau terdapat partai yang dominan, politisi cenderung merasa aman dengan posisinya sehingga merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Sebaliknya, semakin ketat kompetisi politik (tidak terdapat partai yang dominan) merupakan insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen partai politik yang berkuasa sehingga dirasakan perlu untuk meningkatkan transparansi (Araujo & Tejedro-Romero, 2016a; Caba Pérez, Rodríguez Bolívar, & López Hernández, 2014; García-Sánchez, Frías-Aceituno, & Rodríguez-Domínguez, 2013; García & García-García, 2010). Namun demikian, semakin ketat atau tinggi kompetisi politik, maka semakin tinggi risiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai yang berkuasa. Sehingga dalam situasi tingkat kompetisi yang rendah, partai yang dominan mungkin akan lebih merasa aman dengan posisinya sehingga cenderung untuk lebih membuka informasi (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012).

Salah satu indikator kinerja keuangan suatu Pemda adalah likuiditas yang sering diukur dengan *Current Ratio* (CR). Semakin tinggi rasio CR, maka menunjukkan semakin mampu suatu Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio CR, maka semakin baik kinerja dari suatu Pemda. Dengan CR yang baik, maka akan mendorong Pemda untuk lebih transparan, terutama terkait informasi keuangan Pemda. Oyelere *et al.*, (2003) menemukan likuiditas sebagai salah satu determinan dari pelaporan internet perusahaan di Selandia Baru dengan arah positif. Sedangkan Utomo (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara likuiditas daerah dengan tingkat pengungkapan informasi pemda keuangan di internet. Aly *et al.* (2010) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan internet perusahaan di Mesir. Indikator kinerja Pemda lainnya adalah tingkat kemandirian Pemda. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu Pemda, maka Pemda akan semakin mudah untuk membiayai pengeluaran terkait pembangunan tanpa tergantung dana dari pemerintah pusat dan akan mendorong pemda semakin transparan.

Masih terdapat berbagai keterbatasan dan inkonsistensi dalam perkembangan riset terkait transparansi dengan konteks pemerintah daerah, khususnya di Indonesia dengan obyek pengamatan masih terbatas yang menyebabkan keterbatasan data serta literatur yang kurang memadai. Dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, penelitian ini memberikan kontribusi berupa tambahan dan atau penguatan referensi terkait pengaruh faktor politik dan keuangan terhadap transparansi keuangan pemerintah Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa informasi bagi pengambilan kebijakan oleh regulator terkait dengan transparansi keuangan pemerintah agar tercipta pengelolaan pemerintah yang *governance* khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### ***Legitimacy Theory* dalam Pemerintahan**

Salah satu teori yang dianggap mampu menjelaskan mengenai pengungkapan informasi dan transparansi adalah *legitimacy theory* (Deegan, 2002; Rodríguez Bolívar,

Alcaide Muñoz, & López Hernández, 2013). Legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa suatu tindakan entitas telah tepat dan sesuai dengan sistem norma sosial, nilai, kepercayaan, dan definisinya (Suchman, 1995). Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks pemerintahan, legitimasi merupakan suatu kondisi pemerintah yang bertindak sesuai dengan sistem norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam suatu pemerintahan, legitimasi merupakan hal yang penting. Pemimpin suatu pemerintahan pasti akan berusaha untuk mendapatkan ataupun mempertahankan legitimasi tersebut. Namun demikian, terkadang masyarakat tidak yakin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketika terdapat suatu tindakan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai yang berlaku, maka saat itulah legitimasi suatu organisasi terancam. Berdasarkan teori tersebut, jika legitimasi suatu organisasi terancam atau diragukan, maka organisasi tersebut akan berusaha mengungkapkan informasi untuk mempromosikan legitimasi organisasi tersebut (Deegan, 2002). Pengungkapan informasi dapat digunakan untuk menumbuhkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah, sehingga mampu meningkatkan legitimasi dari para pelaku pemerintahan.

### **Signalling Theory pada Pemerintahan**

*Signaling theory* merupakan teori yang banyak digunakan untuk mempelajari asimetri informasi antara dua pihak sebagai akibat dari perbedaan pengetahuan di berbagai konteks organisasi dan bisnis (Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011). *Signaling theory* mempunyai fungsi mengurangi asimetri informasi. *Signaler* atau pihak dalam yang memiliki informasi akan berusaha mengirimkan sinyal berupa informasi positif sebagai upaya menyampaikan sisi baik organisasi kepada *receiver* atau pihak ketiga yang akan menerima informasi tersebut (Connelly *et al.*, 2011). Dalam konteks pemerintahan, *signaling theory* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan amanah oleh rakyat akan berusaha untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakatnya (Martani, Fitriarsi, & Annisa, 2014). Asimetri informasi terjadi antara pihak pemerintah sebagai pihak dalam dengan masyarakat sebagai pihak luar karena masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai internal pemerintah. Pemerintah akan berusaha mengurangi asimetri informasi tersebut dengan memberikan sinyal berupa informasi positif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra positif pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pemerintah. Pemda dapat menyampaikan sinyal yang positif kepada masyarakat melalui *website*. Sinyal positif itu dapat berupa informasi keuangan Pemda, informasi kinerja, dan berbagai penjelasan lainnya yang dimuat dalam *website* pemda yang akan menunjukkan kebaikan dari Pemda tersebut. Pengungkapan informasi positif melalui *website* ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pemda telah menjalankan pemerintahan dengan baik sebagai amanat dari masyarakat.

### **Pengembangan Hipotesis**

Kepala daerah yang mempunyai pengalaman cenderung akan lebih transparan terhadap informasi karena telah mengetahui pentingnya pengungkapan informasi publik dan pemahaman terhadap peraturan. Kepala daerah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau sekretaris daerah mempunyai insentif dalam pemahaman atas transparansi informasi publik sehingga akan cenderung lebih transparan. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak berpengalaman

dalam menjalankan roda pemerintahan kurang dalam pemahaman mengenai perlunya pengungkapan informasi kepada masyarakat sehingga cenderung kurang transparan. Gherghina (2011) menunjukkan bahwa kepala daerah petahana mempunyai kinerja yang lebih baik cenderung memberikan informasi yang lebih banyak sehingga masyarakat akan memilih ulang pemimpin tersebut pada pemilu berikutnya. Hal ini menunjukkan dengan pengalaman pemerintahannya, petahana cenderung mengungkapkan kinerja yang baik untuk mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

**H<sub>1</sub> : Profil kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah**

Ideologi politik mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dan transparansi. Araujo & Tejedo-Romero (2016a), del Sol (2013), dan Piotrowski & Van Ryzin (2007) meyakini terdapat hubungan yang signifikan antara ideologi politik dan transparansi. Guillamón, Bastida, & Benito (2011) dan García-Sánchez *et al.* (2013) menunjukkan bahwa partai sayap kiri cenderung lebih transparan dibandingkan partai sayap kanan di pemerintahan Spanyol. Namun demikian, Piotrowski & Van Ryzin (2007) dan Grimmelikhuijsen & Welch (2012) menyatakan bahwa kedua belah partai mempunyai ketertarikan terhadap transparansi serta memiliki hubungan yang ambigu terhadap transparansi karena adanya konflik kepentingan dalam pengungkapan informasi. Cuadrado-Ballesteros, Frías-Aceituno, & Martínez-Ferrero (2014) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ideologi politik dengan tingkat pengungkapan informasi pada Pemda. Untuk Indonesia yang menganut sistem multi partai, tidak ada partai yang mempunyai suara mayoritas. Dengan demikian koalisi dan oposisi menjadi suatu keharusan. Semakin besar partai pendukung kepala daerah, semakin tinggi perhatian masyarakat terhadap kinerja mereka. Karena tuntutan yang tinggi tersebut, masyarakat akan membutuhkan informasi sehingga mendorong keterbukaan informasi yang lebih besar. Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

**H<sub>2</sub> : Ideologi politik berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah**

Persaingan politik terkait dengan pengawasan kegiatan antar partai dan tekanan untuk lebih transparan (Araujo & Tejedo-Romero, 2016a). Terdapat dua pandangan mengenai persaingan politik dan transparansi informasi pemerintah. Menurut Berliner & Erlich (2015), kompetisi politik mempunyai peran penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi. Ketika kompetisi politik rendah atau terdapat partai yang dominan, politisi cenderung merasa aman dengan posisinya sehingga merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Sebaliknya, semakin ketat kompetisi politik (tidak terdapat partai yang dominan) merupakan insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen partai politik yang berkuasa sehingga dirasakan perlu untuk meningkatkan transparansi (Araujo & Tejedo-Romero, 2016a; Caba Pérez *et al.*, 2014; García-Sánchez *et al.*, 2013; García & García-García, 2010). Lebih lanjut, Alcaide Muñoz, Rodríguez Bolívar, & López Hernández (2017) menemukan bahwa kompetisi politik yang ketat merupakan pendorong utama tingkat transparansi informasi pemerintah. Navarro-Galera *et al.* (2018) juga menemukan pengaruh positif kemandirian daerah pada transparansi

informasi publik, baik keuangan maupun non-keuangan. Namun demikian, semakin ketat atau tinggi kompetisi politik, maka semakin tinggi risiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai yang berkuasa. Sehingga dalam situasi tingkat kompetisi yang rendah, partai yang dominan mungkin akan lebih merasa aman dengan posisinya sehingga cenderung untuk lebih membuka informasi (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012). Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

**H<sub>3</sub> : Tingkat kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah**

Salah satu indikator kinerja keuangan suatu Pemda adalah likuiditas yang sering diukur dengan *Current Ratio* (CR). Semakin tinggi rasio CR, maka menunjukkan semakin mampu suatu Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio CR, maka semakin baik kinerja dari suatu Pemda. Dengan CR yang baik, maka akan mendorong pemda untuk lebih transparan, terutama terkait informasi keuangan pemda. Pada konteks sektor privat, Oyelere *et al.* (2003) menemukan likuiditas sebagai salah satu determinan dari pelaporan internet perusahaan di New Zealand dengan arah positif. Aly *et al.* (2010) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan informasi di internet pada perusahaan di Mesir. Harrison & Sayogo (2014) menemukan hubungan positif antara kompetisi politik dan transparansi pemerintah daerah. Navarro-Galera *et al.* (2018) juga memberikan temuan yang mendukung dimana kompetisi politik juga merupakan faktor yang relevan dalam menentukan tingkat transparansi pemerintah daerah di negara-negara Eropa bagian Selatan yang didominasi negara demokratis. Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>4</sub> : Likuiditas daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah**

Indikator kinerja Pemda lainnya adalah tingkat kemandirian Pemda terhadap anggaran Pemerintah Pusat. Setiap daerah mempunyai berbagai potensi yang dapat digali yang mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu Pemda, maka Pemda akan semakin mudah untuk membiayai pengeluaran terkait pembangunan tanpa tergantung dana dari Pemerintah Pusat dan akan mendorong Pemda semakin transparan. Alcaide Muñoz *et al.* (2017) mengemukakan bahwa pemerintah dengan kemampuan finansial lebih tinggi cenderung akan menerbitkan informasi yang lebih lengkap. Guillamón *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa Pemda dengan transparansi yang baik cenderung memiliki kemandirian lebih tinggi dalam hal menghasilkan pendapatan dari pajak. Temuan penelitian Navarro-Galera *et al.* (2018) juga mendukung bahwa terdapat hubungan positif antara kemandirian daerah dengan transparansi informasi, baik keuangan dan non-keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, Mudhofar & Tahar (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pada tingkat akuntabilitas informasi di LKPD. Sedangkan Rahim & Martani (2016) menemukan bahwa tingkat kemandirian suatu Pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada *website* pemda. Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

**H<sub>5</sub> : Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah**

## METODE PENELITIAN

### Desain dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria: Pemda yang memiliki *website* resmi yang dapat diakses selama bulan Oktober hingga November 2016; Pemda yang memiliki LKPD tahun 2014 yang telah diaudit oleh BPK; Pemda yang memiliki data kompetisi politik DPRD kabupaten/kota (persentase perolehan suara untuk partai tertinggi pertama dan kedua); pemerintah daerah yang memiliki data profil kepala daerah (gender dan riwayat jabatan/pekerjaan) dan partai pendukungnya; dan Pemda yang memiliki data jumlah penduduk tahun 2015.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data tingkat transparansi informasi *website* pemda diperoleh dari hasil observasi terhadap masing-masing *website* Pemda. Data profil kepala daerah dan gender diperoleh dari *website* pemda dan sumber lainnya. Data ideologi politik diperoleh dari data kepala daerah pada *website* Kementerian Dalam Negeri dan sumber lainnya. Data terkait kompetisi politik diperoleh dari data pada *website* Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah, serta sumber lainnya. Data terkait informasi keuangan pemda diperoleh dari LKPD tahun 2014 yang telah dikeluarkan oleh BPK RI. Data populasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/Kota tahun 2014	514
Kabupaten/Kota Administrasi	(6)
Kabupaten/Kota yang <i>website</i> tidak ada/tidak aktif	(68)
Kabupaten/Kota yang tidak tersedia data LKPD	(50)
Kabupaten/Kota yang tidak tersedia data kompetisi politik	(81)
Data sampel yang diperoleh	309

### Variabel dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Tingkat transparansi informasi dalam *website* Pemda dan variabel independent terdiri dari; Profil Kepala Daerah, Ideologi Politik, Tingkat Kompetisi Politik, Likuiditas Daerah (CR), Kemandirian Daerah (OR/TR) serta variabel kontrol terdiri Populasi dan Gender. Secara lebih ringkas variabel dan operasionalisasi variabel dapat dijelaskan dengan Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Variabel dan Pengukurannya**

Variabel	Akronim	Ukuran	Referensi
Indeks Transparansi keuangan pemerintah daerah	TRANSP	Jumlah informasi wajib disampaikan oleh badan publik pada UU KIP dan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ yang terpenuhi oleh <i>website</i>	UU KIP dan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ



Variabel	Akronim	Ukuran	Referensi
Status Kepala Daerah	INCUMB	pemda dibagi dengan jumlah total informasi wajib (32 item informasi) Dummy variabel, 1 jika kepala daerah sebelumnya menjabat sebagai kepala atau wakil atau sekretaris daerah, dan 0 jika tidak.	Gherghina (2011)
Ideologi politik	IDEPOL	Dummy variabel, 1 jika kepala daerah didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu, dan 0 jika tidak.	Araujo & Tejedo-Romero (2016a), Guillamón <i>et al.</i> (2011), Piotrowski & Van Ryzin (2007)
Kompetisi politik	KOMPOL	Jumlah persentase suara partai pemenang pemilu peringkat kesatu dikurangi dengan jumlah persentase suara partai pemenang pemilu peringkat kedua.	Araujo & Tejedo-Romero (2016a), Guillamón <i>et al.</i> (2011)
Likuiditas	CR	Jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah kewajiban lancar pemerintah daerah	Cohen (2008)
Kemandirian	ORTR	Jumlah pendapatan asli daerah setelah dikurangi dengan belanja subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dibagi dengan total pendapatan daerah	Cohen (2008)
Populasi penduduk	POPUL	Jumlah penduduk pemerintah daerah di tahun pengamatan	Alcaide Muñoz <i>et al.</i> , (2017), del Sol (2013), Guillamón <i>et al.</i> (2011)
Gender	GENDER	Dummy variable, 1 jika kepala daerah bergender perempuan dan 0 jika kepala daerah bergender laki-laki	Araujo & Tejedo-Romero (2016a), Guillamón <i>et al.</i> (2011)

### Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh status kepala daerah, ideologi politik, tingkat kompetisi politik, likuiditas, kemandirian daerah terhadap tingkat transparansi informasi dalam *website* pemda dengan populasi dan gender sebagai variabel kontrol. Persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$\text{TRANSP} = \alpha + \beta_1 \text{INCUMB} + \beta_2 \text{IDEPOL} - \beta_3 \text{KOMPOL} + \beta_4 \text{CR} + \beta_5 \text{ORTR} + \beta_6 \text{POPUL} - \beta_7 \text{GENDER} + \varepsilon$$

Keterangan:

TRANSP = Tingkat transparansi informasi dalam *website* Pemda  
 INCUMB = Profil kepala daerah  
 IDEPOL = Ideologi politik daerah  
 KOMPOL = Tingkat kompetisi politik daerah  
 CR = Likuiditas daerah  
 ORTR = kemandirian daerah

POPUL	= Jumlah penduduk Daerah
GENDER	= Gender daerah
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	= Koefisien regresi
$\varepsilon$	= <i>Error term.</i>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3<sup>a</sup> dan 3<sup>b</sup>. Variabel dependen yakni tingkat transparansi informasi pada *website* pemda memiliki rata-rata sebesar 0,351 atau sebesar 35,1%. Tingkat transparansi informasi pada *website* pemda masih dalam tingkat yang rendah, karena dari 32 *checklist* yang digunakan, hanya terpenuhi sebanyak rata-rata 35,1%. Tingkat kompetisi politik memiliki rata-rata sebesar 6,754 yang berarti bahwa rata-rata selisih kemenangan antara partai pemenang pertama dan kedua pada DPRD kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar 6,75%, sehingga memberi gambaran bahwa tingkat kompetisi politik daerah rata-rata adalah tinggi atau ketat. *Current ratio* memiliki rata-rata sebesar 1.123,1 yang menunjukkan kemampuan pemda yang sangat tinggi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Pemerintah daerah mempunyai jumlah aset lancar dengan nilai yang besar untuk kegiatan operasional dalam rangka penyediaan layanan bagi publik, sementara jumlah kewajiban lancarnya dalam nilai yang sangat kecil. *Operating revenue to total revenue* mempunyai rata-rata sebesar 0,064 yang berarti bahwa rata-rata tingkat kemandirian Pemda dari dana pemerintah pusat adalah sebesar 6,39%. Hal ini mendeskripsikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas transfer dana dari pemerintah pusat adalah tinggi. Populasi memiliki rata-rata sebesar 551,406 yang berarti bahwa rata-rata jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota adalah sebesar 551.406 orang. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Bogor sejumlah 5.459.700 orang dan Kabupaten Mahakam Ulu adalah pemerintah daerah dengan jumlah penduduk terendah, yaitu 25.970 orang.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSP	309	0,062	0,875	0,351	0,175
KOMPOL	309	0,000	46,770	6,754	7,502
CR	309	274,689	3.698,765	1.123,100	816.216
ORTR	309	-0,173	0,950	0,064	0,1139823
POPUL	309	25.970	5.459.700	552.406	641.031

Keterangan: TRANSP = Tingkat transparansi informasi pada website Pemda; KOMPOL = Tingkat kompetisi politik daerah; CR = Likuiditas daerah; ORTR = Kemandirian daerah, POPUL = Jumlah penduduk daerah.

**Tabel 3<sup>b</sup>**  
**Statistik Deskriptif**

	INCUMB		IDEPOL		GENDER	
	<i>Dummy</i>		<i>Dummy</i>		<i>Dummy</i>	
	0	1	0	1	0	1
Frekuensi	128	181	113	196	282	27
%	41,4	58,6	36,6	63,4	91,3	8,7

	INCUMB		IDEPOL		GENDER	
	<i>Dummy</i>		<i>Dummy</i>		<i>Dummy</i>	
	0	1	0	1	0	1
Persentil	25	0	0	0	0	0
	50	1	1	1	0	0
	75	1	1	1	0	0

*Keterangan: INCUMB = Profil kepala daerah; IDEPOL = Ideologi politik daerah; GENDER = Gender kepala daerah.*

Tabel 3<sup>b</sup> menunjukkan 181 kepala daerah atau 58,6% adalah petahana yang telah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau sekretaris daerah dalam pemerintahan sebelumnya. Pengalaman sebagai petahana tersebut dapat menjadi insentif dalam melakukan transparansi informasi. Selain itu, Tabel 3<sup>b</sup> juga menunjukkan bahwa kepala daerah yang didukung oleh tiga partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, atau Gerindra adalah 63,4%. Deskripsi ini mengindikasikan bahwa ada kesesuaian politik nasional dengan politik daerah sehingga kemungkinan terjadinya keselarasan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah lebih tinggi karena dalam satu kelompok partai yang sama. Selanjutnya, kepala daerah dengan gender perempuan hanya 8,7% dan dapat dinyatakan bahwa mayoritas (91,3%) kepala daerah di Indonesia adalah laki-laki.

**Tabel 4**  
**Hasil Checklist Transparansi Informasi Pemerintah Daerah**

No.	Checklist	Transparansi (%)	No.	Checklist	Transparansi (%)
1	Alamat lengkap	100.00	17	Perjanjian Pihak Ketiga	1.29
2	Ruang Lingkup Kegiatan	0.97	18	Kolom Berita	97.09
3	Maksud dan tujuan (Visi dan Misi)	86.08	19	Tata cara Layanan Masyarakat /perizinan	44.98
4	Tupoksi	1.62	20	Laporan akses info publik	10.03
5	Struktur organisasi	82.85	21	Ringkasan RKA SKPD	34.63
6	Gambaran Umum SKPD	23.62	22	Ring. RKA PPKD	31.39
7	Profil Pejabat Struktural	8.74	23	Raperda APBD	28.16
8	Laporan Harta Kekayaan	3.24	24	Raperda APBD-P	17.48
9	LAKIP/ LKJIP 2015	32.04	25	Perda APBD	40.13
10	Daftar Peraturan/jdih	71.84	26	Perda APBD-P	20.39
11	Sistem Layanan Informasi	72.49	27	Ringkasan DPA SKPD	36.25
12	Info Pengaduan	23.95	28	Ringkasan DPA PPKD	32.69
13	Info Pengadaan	88.35	29	LRA SKPD	7.77
14	Daftar Informasi Publik	21.36	30	LRA PPKD	6.15
15	Renstra/RPJMD	55.34	31	LKPD Audited 2015	5.50
16	Renja/ RKPD 2015	38.51	32	Opini LKPD	3.88

*Sumber: UU KIP dan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ*

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas dengan hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk persamaan regresi sebesar 2,107 dengan signifikansi sebesar 0,089 dengan demikian data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan variabel seluruh variabel memiliki *tolerance value* > 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen pada penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* menunjukkan semua variabel memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

### Pengujian Regresi Berganda

Tabel 5 menyajikan hasil pengujian regresi berganda yang menunjukkan pengaruh profil kepala daerah, ideologi politik, tingkat kompetisi politik, likuiditas, dan kemandirian daerah terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda dengan variabel kontrol populasi dan gender. Berdasarkan uji koefisien regresi yang dilakukan, didapatkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebagai pengukur *goodness of fit* dari model regresi sebesar 0,130 atau 13%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel dependen, yakni tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda dapat dijelaskan oleh variabel independen; profil kepala daerah, ideologi politik, tingkat kompetisi politik, gender, likuiditas, kemandirian daerah, populasi dan gender (variabel kontrol) sebesar 13%, sedangkan sisanya sebesar 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Regresi Berganda**

	<i>Exp. Sign</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
(Constant)		-0,257	0,183	-1,401	0,163
INCUMB	+	<b>0,001</b>	<b>0,022</b>	<b>0,058</b>	<b>0,053<sup>b</sup></b>
IDEPOL	+	-0,006	0,023	-0,243	0,808
KOMPOL	-	<b>-0,004</b>	0,002	-2,667	<b>0,008<sup>a</sup></b>
CR	+	0,016	0,015	1,067	0,287
ORTR	+	<b>0,069</b>	0,027	2,525	<b>0,012<sup>a</sup></b>
POPUL	+	<b>0,121</b>	0,030	4,005	<b>0,000<sup>a</sup></b>
GENDER	-	<b>-0,086</b>	0,037	-2,326	<b>0,021<sup>a</sup></b>
<i>R</i>		0,395			
<i>R square</i>		0,156			
<i>Adj. R square</i>		0,130			
<i>F value</i>		7,895			<b>0,000<sup>a</sup></b>

Keterangan: INCUMB = Profil kepala daerah; IDEPOL = Ideologi politik daerah; KOMPOL = Tingkat kompetisi politik daerah; CR = Likuiditas daerah; ORTR = Kemandirian daerah, POPUL = Jumlah penduduk daerah; GENDER = Gender kepala daerah, <sup>a</sup>signifikan pada level 5%, <sup>b</sup>signifikan pada level 10%.

Hasil pengujian signifikan parameter individual atau parsial menunjukkan bahwa profil kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan sebelumnya bahwa pemimpin

petahana menyampaikan kinerja dengan pengungkapan yang lebih banyak di *website* pemerintah agar masyarakat memilih ulang pada pemilu berikutnya (Gherghina, 2011). Kepala daerah yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah mempunyai pengalaman lebih dalam mengelola pemerintahan. Kemampuan dan pengetahuan kepala daerah sebagai pejabat pemerintahan sebelumnya memberikan insentif tambahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengungkapan informasi pada *website* Pemda merupakan pengungkapan sukarela dan penting bagi kepala daerah sebagai salah satu media untuk promosi kinerjanya. Berdasarkan data bahwa 59% kepala daerah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau sekretaris daerah yang menunjukkan mereka sebagai petahana sehingga transparansi informasi dianggap memberikan keuntungan untuk mereka agar dapat terpilih kembali pada pemilu di periode berikutnya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ideologi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* pemda. Hal ini tidak konsisten dengan Araujo & Tejedo-Romero (2016a), del Sol (2013), Piotrowski & Van Ryzin (2007) bahwa terdapat hubungan antara ideologi politik dengan transparansi. Namun hasil ini sesuai Cuadrado-Ballesteros, *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ideologi politik dengan tingkat pengungkapan informasi pada Pemda. Di Indonesia, ideologi politik yang menggambarkan suatu partai dan kebijakannya tidak terbagi dalam dua pihak, yaitu partai sayap kiri dan partai sayap kanan, sebagaimana yang terjadi di negara lain (Guillamón *et al.*, 2011). Pengklasifikasian partai di Indonesia kurang jelas oleh karena Indonesia menganut sistem multi partai dengan setiap partai mempunyai desain yang berbeda dalam transparansi. Hal ini tidak efisien sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat transparansi. Selain itu, pembagian ideologi politik berdasarkan 3 partai terbesar DPR-RI mungkin tidak sejalan dengan partai yang mendominasi DPRD Pemda masing-masing. Kepala daerah mungkin saja didukung dari partai yang dominan pada DPRD pemda tetapi bukan partai yang dominan pada DPR RI, karena pada akhirnya pengawasan berada pada legislatif daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, tingkat transparansi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ideologi politik.

Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa tingkat kompetisi politik berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda. Berdasarkan hasil penelitian, maka semakin tinggi selisih kemenangan partai pertama dan kedua DPRD kabupaten/kota (tingkat kompetisi rendah), maka semakin rendah tingkat transparansi informasi pada *website* pemda. Pandangan dari Araujo & Tejedo-Romero (2016a), Caba Pérez *et al.* (2014), García-Sánchez *et al.* (2013), dan García & García-García (2010) menyatakan bahwa kompetisi politik yang ketat, yakni keadaan tidak terdapat partai yang dominan akan mendorong untuk peningkatan transparansi. Namun, temuan ini masih sesuai dengan yang diungkapkan pada literatur sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan Grimmelikhuijsen & Welch (2012), semakin ketat kompetisi politik, maka semakin tinggi risiko dalam pengungkapan informasi yang akan melemahkan posisi partai yang berkuasa. Sebaliknya, dalam situasi terdapat partai yang dominan, partai tersebut akan merasa aman dan cenderung lebih transparan. Kompetisi politik yang rendah menunjukkan adanya partai yang dominan dalam legislatif daerah. Dalam keadaan ini, partai yang dominan tidak akan merasakan tekanan yang tinggi dari partai pesaingnya. Risiko yang akan melemahkan kekuasaan partai juga akan rendah. Keyakinan yang tinggi bahwa masyarakat akan tetap memilih partai mereka membuat

tidak terdapat risiko atas pengungkapan informasi lebih yang mampu menjatuhkan kekuasaan partai. Selain itu, dalam keadaan tingkat kompetisi politik yang ketat atau tidak terdapat partai yang mendominasi pada legislatif daerah, setiap partai akan berusaha menuntut kepentingan politik partainya masing-masing. Dalam keadaan tersebut, pihak eksekutif akan cenderung menutup informasi.

Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda. Hasil penelitian ini tidak mendukung Oyelere *et al.* (2003) yang menunjukkan hubungan positif antara likuiditas atau *current ratio* terhadap pelaporan di internet. Namun demikian, hasil penelitian ini mendukung Aly *et al.* (2010), dan Utomo (2015) yang membuktikan bahwa likuiditas daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi. Pemda di Indonesia mempunyai nilai rata-rata *current ratio* yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3323,1. Hal ini dikarenakan proporsi kewajiban jangka pendeknya yang sangat kecil dibandingkan aset lancarnya. Karena kewajiban jangka pendek yang sangat kecil dan dianggap tidak signifikan, pemda merasa bahwa tanpa hutang sekalipun Pemda masih dapat menjalankan roda pemerintahannya (Utomo, 2015) sehingga tidak perlu memberikan pengungkapan informasi melalui *website*. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda. Hasil penelitian ini mendukung Mudhofar & Tahar (2016) yang membuktikan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengungkapan informasi pada *website* Pemda. Hasil penelitian ini juga mendukung Navarro-Galera *et al.* (2018) yang menemukan bahwa tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. *Operating Revenue to Total Revenue* menunjukkan tingkat kemandirian pemda terhadap anggaran dari pemerintah pusat. Semakin tinggi *Operating Revenue to Total Revenue*, maka semakin mandiri atau independen suatu daerah. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah, maka Pemda akan berusaha mengungkapkan informasi dalam *website* yang menunjukkan informasi keuangan, kegiatan, atau pelayanan sebagai hasil dari pendapatan asli daerah tersebut. Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut, diharapkan kinerja Pemda akan dinilai baik oleh masyarakat dan meningkatkan citra positif dari Pemda.

Populasi sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* pemda. Hal ini sesuai dengan penelitian Araujo & Tejedo-Romero (2016a) del Sol (2013), dan Martani, *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa populasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap indeks transparansi. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Alcaraz, *et al.* (2013) yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara jumlah populasi dengan tingkat transparansi informasi pada pemerintah regional. Semakin tinggi populasi suatu daerah, maka permintaan atas pelayanan suatu pemda akan semakin tinggi. Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap pelayanan akan mendorong pemda untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk mempermudah dan mengefisienkan pelayanan masyarakat, yakni dengan pengungkapan informasi yang lebih baik pada *website*. Dengan adanya transparansi informasi pada *website* pemda, masyarakat akan lebih mudah dalam mengetahui informasi mengenai pemda dan berbagai pelayanan serta kegiatan yang dilakukan oleh pemda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa gender, dalam hal ini wanita, memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat transparansi informasi pada *website* pemda. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan (Araujo & Tejedo-Romero, 2016b) yang menemukan bahwa kepala daerah dengan gender perempuan mempunyai hubungan positif

signifikan dengan indeks transparansi di pemda Spanyol. Di Indonesia, Kepala daerah didominasi oleh gender laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah dengan gender laki-laki cenderung lebih transparan daripada kepala daerah dengan gender perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah dengan gender laki-laki lebih aktif dan terlibat dalam politik (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Penting bagi mereka untuk memenuhi janji politik dan memenuhi ekspektasi dari masyarakat atas kinerja Pemda. Salah satu cara untuk menunjukkan kinerja dan pemenuhan janji politik yakni dengan pengungkapan informasi pada *website* pemda. Dengan transparansi informasi yang lebih baik, masyarakat akan dengan mudah menilai kinerja suatu Pemda. Selain itu, laki-laki yang lebih terikat dengan peraturan menganggap pengungkapan informasi merupakan hal yang penting, dan *website* sebagai media pengungkapan informasi mampu memberikan kemudahan akses dan biaya yang lebih efisien yang merupakan *winning solution* untuk Pemda.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian menjadi dasar penarikan simpulan penelitian bahwa profil kepala daerah, tingkat kompetisi politik, dan tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh ideologi politik daerah dan likuiditas daerah terhadap transparansi informasi pemerintah daerah. Selain itu, jumlah penduduk daerah dan gender kepala daerah sebagai variabel kontrol juga berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintah daerah.

Hasil ini mempunyai implikasi bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan transparansi informasi bahwa pemerintah daerah penting untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah agar lebih transparan tanpa menyembunyikan informasi kepada masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Selain itu, kepala daerah petahana cenderung lebih banyak menyampaikan informasi sebagai upaya menarik simpati masyarakat untuk kembali memimpin daerahnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dan teliti dalam membaca informasi agar memperoleh informasi yang tidak bias terutama ketika kepala daerah adalah petahana. Selain itu, tingkat kompetisi yang tinggi dapat menurunkan transparansi, oleh karena itu, masyarakat perlu lebih aktif untuk mendapatkan informasi ketika tingkat kompetisi politik daerah dalam tingkat yang rendah.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam kaitannya dengan data yang menggunakan *website* Pemda sebagai sumber data. *Website* Pemda tidak secara keseluruhan dapat diakses, tidak dikelola secara memadai, dan tidak dilakukan *update* informasi oleh Pemda sehingga informasi yang didapatkan terbatas. Selain itu, terdapat keterbatasan data dengan data yang lebih terkini belum dapat diperoleh karena faktor ketersediaan data. Selain itu, penelitian ini menggunakan indeks dengan atau *checklist* untuk menentukan seberapa besar tingkat transparansi informasi pada *website* Pemda sehingga subjektivitas peneliti tidak sepenuhnya dapat dihilangkan.

## Saran

Penelitian selanjutnya terkait transparansi pemerintah daerah di Indonesia sebaiknya mengembangkan suatu indeks transparansi yang dapat mengakomodasi subjektivitas peneliti guna mengukur transparansi suatu pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan *mixed method* dimana akan jauh lebih baik dengan dilengkapi analisis kualitatif dalam rangka mengkonfirmasi hasil analisis penelitian secara kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138.
- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550-573.
- Aly, D., Simon, J., & Hussainey, K. (2010). Determinants of corporate internet reporting: Evidence from Egypt. *Managerial Auditing Journal*, 25(2), 182-202.
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016a). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327-347.
- Araujo, J. F. F. E., & Tejedo-Romero, F. (2016b). Women's political representation and transparency in local governance. *Local Government Studies*, 42(6), 885-906.
- Berliner, D., & Erlich, A. (2015). Competing for Transparency: Political Competition and Institutional Reform in Mexican States. *American Political Science Review*, 109(1), 110-128.
- Caba Pérez, M. del C., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2014). The determinants of government financial reports online. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 10(42), 5-31.
- Cohen, S. (2008). Identifying the moderator factor of financial performance in Greek Municipalities. *Financial Accountability & Management*, 24(3), 265-294.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
- Cuadrado-Ballesteros, B., Frías-Aceituno, J., & Martínez-Ferrero, J. (2014). The role of media pressure on the disclosure of sustainability information by local governments. *Online Information Review*, 38(1), 114-135.
- da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866-893.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311.
- del Sol, D. A. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1), 90-107.
- García-Sánchez, I. M., Frías-Aceituno, J. V., & Rodríguez-Domínguez, L. (2013). Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments. *Journal of Cleaner Production*, 39(1), 60-72.



- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695.
- Gherghina, S. (2011). Does government performance matter? Electoral support for incumbents in six post-communist countries. *Contemporary Politics*, 17(3), 257–277.
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments. *Public Administration Review*, 72(4), 562–571.
- Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. *Local Government Studies*, 37(4), 391–406.
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525.
- Martani, D., Fitriyari, D., & Annisa. (2014). Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60(3), 504–516.
- Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T. (2014). Disclosure of non-financial information about public services on the official website of local governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 66(1), 500–512.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 176–185.
- Navarro-Galera, A., Alcaraz-Quiles, F. J., & Ortiz-Rodriguez, D. (2018). Enhancing sustainability transparency in local governments-An empirical research in Europe. *Sustainability*, 10(7), 1–22.
- Oyelere, P., Laswad, F., & Fisher, R. (2003). Determinants of internet financial reporting by New Zealand Companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 14(1), 26–63.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda, dan karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan website Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi XIX*, 1–79. Lampung.
- Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & López Hernández, A. M. (2013). Determinants of Financial Transparency in Government. *International Public Management Journal*, 16(4), 557–602.
- Schillemans, T., Van Twist, M., & Vanhommerig, I. (2013). Innovations in accountability: Learning through interactive, dynamic, and citizen-initiated forms of accountability. *Public Performance and Management Review*, 36(3), 407–435.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.

*Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Utomo, K. C. (2015). *Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah Indonesia* (Thesis: Universitas Sebelas Maret). Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47909/Determinan-Pengungkapan-Informasi-Kuangan-pada-Website-Pemerintah-Daerah-Indonesia>